

**PENGARUH PEMBERLAKUAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Kasus di Kelurahan Talang Kelapa Palembang)**

SKRIPSI



**Nama : Derry Ramadhan
NIM : 222016274**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERLAKUAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Kasus di Kelurahan Talang Kelapa Palembang)**

**Untuk Memnuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Derry Ramadhan
NIM 222016274**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Derry Ramadhan

Nim : 222016274

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul skripsi : Pengaruh Pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Talang Kelapa Palembang)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2022


Derry Ramadhan



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

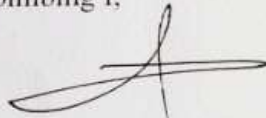
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Pengaruh Pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan
Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Talang
Kelapa Palembang)**

Nama : Derry Ramadhan
NIM : 222016274
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan disahkan
Pada tanggal

Pembimbing I,



Dr. Betri, S.E. Ak., M.Si, C.A
NIDN/NBM : 021610802/944806

Pembimbing II,



Hj. Ida Zuraidah, SE.Ak, M.Si
NIDN/NBM : 0224017201

Mengetahui,
Dekan
Fak. Kejuruan Program Akuntansi



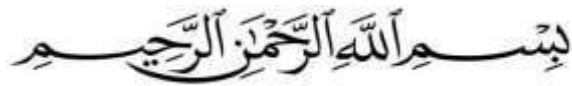
Dr. Betri, S.E. Ak., M.Si, C.A
NIDN/NBM : 021610802/944806

MOTTO

*Keberhasilan itu pasti ada selagi mau berusaha dan berdoa
Never stop, keep trying*

☞ *Kupersembahkan Skripsi ini kepada :*

*Mama dan papa tercinta
Kakak dan adikku
Keluarga besarku
Rekan kerjaku di Memory Coffee
Teman dan tim fotoku
Salsa dan Kak Nadia
Pembimbingku
Almamaterku*



PRAKATA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya jua, akhirnya skripsi yang berjudul : “ *Pengaruh Pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Talang Kelapa Palembang)* “, telah selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama serta motivasi dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memanjatkan doa untuk keberhasilan anaknya, serta senantiasa memotivasi dan menasihati dengan penuh kasih sayang.

Penulis juga menyampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Yudha Mahrom, SE., M.Si
3. Ketua Program Studi Akuntansi sekaligus Pembimbing I, Bapak Dr. Betri, SE.Ak., M.Si yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran kepada penulis
4. Pembimbing II, Ibu Hj. Zuraidah, SE., M.Si yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sifatnya menyempurkan skripsi ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Serta sahabat-sahabatku Tubagus Roqi, Puja, Aldi, Rinton, Tatak, dan Gustin.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatatnya sebagai ibadah di sisi-Nya. Aamiin ya robbal alaamin.

Walaikumussalam warohmatullahi wabarokatuh

Palembang, Agustus 2022
Penulis,

Derry Ramdhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
B. Penelitian Sebelumnya	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Operasionalisasi Variabel	35
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Talang Kelapa Tahun 2021	4
II.1 Penelitian Sebelumnya	32
III.1 Operasional Variabel	35
IV.1 Bagian Keuangan	43
IV.2 Berdasarkan Jenis Kelamin	43
IV.3 Berdasarkan Usia	44
IV.4 Tingkat Pendidikan	44
IV.5 Masa Kerja	45
IV.6 Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Yang Digunakan	45
IV.7 Prosedur Penataan Akuntansi	46
IV.8 Penyusunan Laporan Keuangan	47
IV.9 Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan dan Dapat Dipahami	48
IV.10 Uji Validitas Data	51
IV.11 Uji Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan	52
IV.12 Kualitas Laporan Keuangan	52
IV.13 Uji Regresi Sederhana	55
IV.14 Uji t (Parsial)	56
IV.15 Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
IV.1 Uji Normalitas	53
IV.2 Uji Heterokedastisitas	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Pengolahan Kuesioner
- Lampiran 3. Hasil Output SPSS
- Lampiran 4. Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5. Fotocopy Surat Keterangan Riset dan Tempat Penelitian
- Lampiran 6. Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-qur'an
- Lampiran 7. Fotocopy Sertifikat Pelatihan SPSS
- Lampiran 8. Fotocopy Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 9. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Komputer Akuntansi
- Lampiran 10. Fotocopy Sertifikat Magang
- Lampiran 11. Fotocopy Keterangan Plagiarisme
- Lampiran 12. Biodata Penulis

ABSTRAK

Derry Ramadhan / 222016274 / 2022 / Pengaruh Pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Talang Kelapa Palembang)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kelurahan Talang Kelapa Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Terdapat 2 variabel yang digunakan, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Populasi adalah seluruh pegawai di Kantor Kelurahan Talang Kelapa. Sampel yang digunakan sebanyak 48 responden yang berstatus sebagai pegawai. Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberlakuan sistem akuntansi keuangan daerah terbukti memiliki memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Kelurahan Talang Kelapa.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan, Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Derry Ramadhan / 222016274 / 2022 / The Effect of the Implementation of the Regional Financial Accounting System on the Quality of Local Government Financial Reports (Case Study in Talang Kelapa Village, Palembang)

The formulation of the problem in this study is: Is there any effect of the implementation of the Local Government Financial Accounting System on the quality of the Local Government Financial Reports in Talang Kelapa Village, Palembang. This research includes descriptive research with a quantitative approach. There are 2 variables used, namely the Regional Financial Accounting System and the Quality of Local Government Financial Reports. The population is all employees at the Talang Kelapa Village Office. The sample used is 48 respondents who are employees. The data collection technique is through a questionnaire. The analytical technique used is Simple Linear Regression. The results of the analysis show that the implementation of the regional financial accounting system is proven to have a positive influence on the quality of financial reports in Talang Kelapa Village.

Keywords: Financial Accounting System, Local Government Financial Quality

No	Nama	NIM	Keterangan
	Derry Ramadhan	222016274	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi seperti sekarang ini, dimana setiap negara pasti membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang bisa dikenal dengan *good governance*. Indonesia perlahan-lahan sudah berkembang menuju era keterbukaan dan transparansi. Dalam era transparansi dan keterbukaan ini Indonesia diharapkan akan lebih terbuka baik dalam sistem kegiatan yang dilaksanakan maupun dalam mengalokasikan anggaran. Kualitas laporan keuangan pemerintahan yang baik dan memerlukan sebuah prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pada saat pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi khususnya akuntansi keuangan daerah, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. (Yusniar, 2016:1).

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya sistem pengelolaan

keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi serta buruknya sistem pengendalian intern sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini disclaimer di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini disclaimer diberikan terhadap laporan keuangan mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ternyata di dalam laporan keuangan pemerintahan masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan (Sanjaya, 2017:5).

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) meningkat. Hal ini juga yang telah mendorong

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntansi publik (Darise, 2018:9).

Berdasarkan hasil observasi awal di Kelurahan Talang Kelapa Palembang diperoleh informasi bahwa laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah Kota Palembang terhadap Laporan Keuangan Kelurahan Talang Kelapa Palembang pada tahun anggaran 2021 mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Kendatipun mendapat opini seperti itu, namun fenomena seperti yang diungkapkan di atas masih tetap ada dan terjadi di Kelurahan Talang Kelapa ini, dimana laporan keuangannya masih terdapat data-data yang belum sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan, seperti kesalahan dalam pencatatan dan penggolongan atas transaksi pelaporan keuangan. Itu sebabnya laporan keuangan di Kelurahan Talang Kelapa Palembang yang telah disajikan masih mendapatkan beberapa catatan dari Auditor BPK untuk menjadi perhatian dalam menyusun laporan keuangan di waktu yang akan datang.

Secara umum opini WDP pada Kelurahan Talang Kelapa tahun 2021 masih dapat diperbaiki untuk laporan keuangan di tahun 2022. Badan Pemeriksaan Keuangan juga menambahkan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Kelurahan Talang Kelapa Palembang belum terlalu kuat atau masih lemah. Terdapat kesalahan dalam menyajikan laporan keuangan yang materialnya beberapa pos laporan keuangan belum sesuai. Laporan Keuangan Kelurahan Talang Kelapa Palembang pada tahun anggaran 2021 sudah dapat diandalkan, tetapi tetap harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan

auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diterapkan standar pemerintah yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berikut disajikan data Laporan Keuangan Kelurahan Talang Kelapa Palembang pada tahun anggaran 2021, seperti pada gambar berikut ini:

Tabel I.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kelurahan Talang Kelapa Tahun 2021

NO. URUT	URAIAN	RBP	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN - LRA	5.1.1	3.750.845.370,9	3.159.094.050,7	84,11	2.313.030.073,1
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	150.640.862,0	144.594.266,9	90,57	174.641.081,1
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	65.358.827,0	64.296.215,9	98,37	105.236.329,3
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	5.950.700,0	6.987.885,8	117,43	7.272.918,7
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	8.376.180,0	7.471.365,1	89,20	8.414.031,1
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	79.963.155,0	65.838.800,3	82,34	53.717.801,8
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	3.402.029.457,1	2.829.337.750,9	83,17	1.975.520.191,1
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	2.863.949.926,1	2.291.810.160,9	80,02	1.527.826.847,1
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	316.629.392,9	210.988.623,1	66,64	113.389.307,4
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	1.823.974.263,1	1.369.165.385,5	75,06	722.093.831,3
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	952.776.510,0	952.776.510,0	100,00	965.517.743,2
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	170.569.760,0	158.879.642,2	93,15	126.825.965,0
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	9.000.000,0	9.000.000,0	100,00	7.500.000,0
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	9.000.000,0	9.000.000,0	100,00	7.500.000,0
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	441.264.531,0	440.712.590,0	99,87	378.425.844,0
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	441.264.531,0	440.712.590,0	99,87	378.425.844,0
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.4	87.815.000,0	87.815.000,0	100,00	61.767.500,0
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.4.1	87.815.000,0	87.815.000,0	100,00	61.767.500,0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	194.167.051,0	185.162.032,7	95,36	162.868.800,9
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	53.365.000,0	44.652.798,9	83,67	45.533.263,3
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	5.1.1.3.2	140.802.051,0	140.509.233,7	99,79	117.335.537,5
5	BELANJA	5.1.2	3.660.126.197,7	2.853.990.613,8	77,98	2.126.926.482,3
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.335.738.863,7	2.008.394.549,8	85,99	1.512.870.305,4
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	737.318.405,0	703.515.152,9	95,42	593.962.968,7
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.494.531.785,2	1.182.212.489,3	81,84	848.270.525,0
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	13.500.000,0	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	2.000.000,0	493.666,0	24,68	5.351.612,0
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	137.228.668,8	121.418.341,6	88,48	62.087.899,3
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	1.160.000,0	754.900,0	65,08	3.257.300,0

Sumber : Kantor Kelurahan Talang Kelapa, 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Kelurahan Talang Kelapa Palembang pada tahun anggaran 2021 sudah cukup baik, tetapi tetap harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor pada saat itu.

Pengelolaan Keuangan Daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih, dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel.

Laporan keuangan informasi yang dihasilkan Tidak terlepas dari banyak pihak atas *stakeholders* yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas. Informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material maupun tidak material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya. Laporan keuangan akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan secara valid, andal, dan dapat dipahami.

Salah satu cara yang diterapkan pemerintah dalam upaya perbaikan dalam meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan dilakukannya reformasi manajemen keuangan dengan menerapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saat ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akural. Standar akuntansi pemerintah merupakan standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sesuai entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka melakukan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ratifah,2012:30).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi

tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu, relevan, andal, dan dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ratifah, 2012:30).

Aditya Sanjaya (2017:77) dalam penelitiannya, penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Karena ini mengemukakan bahwa semakin baik standar akuntansi pemerintah yang diharapkan, semakin tinggi kualitas laporan keuangan. Ini terjadi karena komitmen yang tinggi terhadap organisasi, yang memungkinkan manajer untuk bekerja lebih profesional, menghasilkan laporan keuangan berkualitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) daerah rata-rata masih lemah agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan handal dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Karena Sistem akuntansi yang lemah akan menghasilkan keandalan yang lebih rendah dari laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. (Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa dibutuhkan kecepatan peningkatan dari sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah menuju langkah spesifik prosedur dan partisipasi berbagai kelompok tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Hasilnya akan mendukung pejabat pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Restika Eklesia (2018:77) dalam penelitiannya, penggunaan teknologi komputer memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam mengerjakan sesuatu dibandingkan dilakukan secara manual. ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah hal ini dikarenakan cara manual tergantikan dengan komputer.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kelurahan Talang Kelapa Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah ada pengaruh pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kelurahan Talang Kelapa Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan : pengaruh Pemberlakuan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kelurahan Talang Kelapa Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam memahami pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, khususnya di Kelurahan Talang Kelapa Palembang.

2. Bagi instansi terkait

Dapat mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, khususnya di Kelurahan Talang Kelapa Palembang.

3. Bagi akademi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.

4. Bagi pembaca

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2017 . *Akuntansi Keuangan Daerah edisi ketiga Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat
- Alam, S. 2017. *Akuntansi SMA untuk Kelas XI*. Jakarta: Esis
- Angga, 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Bandung: jurnal akuntansi pemerintah.
- Darise, Nurlan. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT INDEKS.
- Davis, F. 2019. Presentasi Kegunaan, dan Kemudahan Pemanfaatan dalam Penerima Pengguna Teknologi Informasi MIS Quarterly, . 13 (3): 319-339.
- Defitri, S. Y. 2018. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi, 3(1), 64-75.
- Febian, Tata Sutabri. 1980. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Ghozali, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang.
- Indra Bastian, 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Jugiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo, 2014. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* Yogyakarta: Andi Offset
- Mardi, 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mene, R. E., Karamoy, H., &Warongan, J. D. 2018. *Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(03).
- Mulyadi, 2017. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- Nordiawan Deddi, 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba 4

- Palupi, Majang Dan Heru KurniantoTjahjono. 2017. *Model Penerimaan Teknologi Aplikasi TAM Dengan Mempertimbangkan Gender Pada Perilaku Penggunaan Internet*. Yogyakarta : Andi Offset
- Peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang *Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pengertian dari kualitas laporan keuangan daerah*
- Pujanira, P., & Taman, A, 2017. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14- 28.
- Putri, 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Bandung: Remaja Rosda
- Ratifah. 2012. *Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Trikonomika.
- Roviyantie, Devi. 2011. “*Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah* “. *Jurnal akuntansi pemerintah*.
- Sadeli, Lili.2017. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sanjaya, A., Rasuli, M., dan Haryani, E..2017..Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi
- Sanjaya. 2015. Dampak Minat dan Kemudahan Pada Minat Berperilaku (niat perilaku) Dalam Pemanfaatan Internet, *Kinerja*, 9, . 146-156.
- Saputra, F. B., & Usmar, D. 2020. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Suatu Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis).
- Sari, Deti Mawar. 2016. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggung jawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung : Remaja Rosda
- Sihombing. 2017. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Bandung : Remaja Rosda

- Silviana, 2015. Standar Kredit Akuntansi Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Silviana, 2013. Hubungan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (survey pada kota di provinsi jawa barat). Proceedingcall for papers dan seminar nasional Fakultas Ekonomi UNS. 30-31.
- Simanjuntak, T. P. 2019. Dampak Penerapan Sistem InformasiManajemen KeuanganDaerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karo Oleh. Jurnal Neraca Agung Volume, 18(1).
- Sugiyanto, Catur, 2015. *Ekonometrika Terapan*. Yogyakarta: BPFE
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyuningsih, E. 2018. Dampak Pendanaan SumberDaya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Peran Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Dinas Dan Badan Kabupaten Sukoharjo) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Windasari, W. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Subang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
- Yusniar 2016. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap GoodGovernance dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.